

PROSES PENCAPAIAN KINERJA BADAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI PADA BIDANG INSTANSI PEMERINTAH PUSAT)

M. Rizky Ramadhan¹

Email: a0c022121@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Rahmi Sri Ramadhani²

Email: rahmisri.ramadhani@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Laporan ini bertujuan untuk mengkaji proses pencapaian kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP). Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap instansi pemerintah pusat di wilayah NTB dalam rangka mendukung tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan efisien. Penelitian ini juga menyoroti peran strategis BPKP dalam mengawal pembangunan nasional melalui audit, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah pusat di daerah. Dengan menggunakan data kinerja tahun 2023 serta pengalaman langsung selama magang, laporan ini menyajikan analisis terhadap tantangan pengawasan, kontribusi BPKP dalam peningkatan governance, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan. BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait lainnya, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: BPKP, Kinerja, Pengawasan, Tata Kelola.

ABSTRACT

This report aims to examine the performance of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative Office of West Nusa Tenggara Province, particularly in the field of Central Government Agencies (IPP). The main focus of the research is to evaluate the effectiveness of BPKP's supervision of central government agencies in the NTB region in order to support accountable, transparent, and efficient state financial management. This study also highlights the strategic role of BPKP in overseeing national development through audits, evaluations, and guidance on the implementation of central government programs in the regions. Using performance data from 2023 and direct experience during the internship, this report presents an analysis of oversight challenges, BPKP's contribution to improving governance, and strategic recommendations for improving the effectiveness of oversight in the future. The BPKP of West Nusa Tenggara Province needs to strengthen coordination with other relevant agencies, both at the provincial and regency/city levels, to ensure that every policy taken can be achieved effectively, efficiently, and in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: BPKP, Performance, Oversight, Governance.

PENDAHULUAN

Proses pencapaian kinerja BPKP NTB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berfungsi sebagai elemen krusial dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang merupakan salah satu tugas inti BPKP dalam pengawasan (D et al., 2020). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan diperoleh sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat kinerja BPKP dalam menjalankan fungsinya (Sumanti, 2020).

Sebagai institusi pengawas, BPKP juga dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan anggaran publik. Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa BPKP berperan aktif dalam memberikan evaluasi dan tinjauan terhadap penggunaan anggaran daerah (Tasik et al., 2024). Dalam konteks NTB, peran BPKP juga mencakup pengawasan terhadap pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan (Irawan & Khodijah, 2021). Selanjutnya, dalam konteks kinerja auditor di BPKP, faktor pengalaman, independensi, dan kompetensi merupakan determinan penting dalam pengambilan keputusan audit (Harsono et al., 2023; Haryoko et al., 2017). Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, serta pengalaman yang relevan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit yang berdampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan publik (Safarah & Umar, 2024).

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, tantangan yang dihadapi oleh BPKP adalah memastikan bahwa auditor mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan, serta beradaptasi dengan sistem whistleblowing yang diperlukan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas (Letik et al., 2025; . Berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja BPKP, seperti teknologi dan sistem pelaporan yang baik, menjadi penting bagi instansi ini untuk terus mengembangkan kompetensi dan membangun sinergi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya (Letik et al., 2025; Sofyanty, 2019). Dengan demikian, proses pencapaian kinerja BPKP di Provinsi NTB merupakan hasil dari serangkaian elemen yang saling berkaitan, mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga sistem pengendalian dan penggunaan teknologi yang efektif. Semua faktor ini berkontribusi pada pengawasan yang lebih baik terhadap keuangan publik, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintah.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan efisien. Salah satu pilar penting dalam memastikan prinsip-prinsip tersebut adalah pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memegang peran strategis sebagai lembaga yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia. BPKP bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara serta mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi pemerintahan. Tidak hanya melakukan audit, BPKP juga memberikan pendampingan, pembinaan, dan evaluasi terhadap kebijakan serta program yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), BPKP memiliki perwakilan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar setiap alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, sehingga mendukung tercapainya pembangunan nasional dan daerah yang merata dan inklusif. Namun, dalam pelaksanaannya, BPKP menghadapi berbagai tantangan, baik internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, maupun eksternal seperti kesenjangan informasi antarinstansi serta kompleksitas koordinasi lintas

sektor. Oleh karena itu, BPKP perlu terus mengembangkan metodologi dan sistem pengawasan yang adaptif dan efektif. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) di BPKP NTB menyediakan berbagai layanan audit, termasuk audit laporan keuangan, audit operasional, audit kinerja, audit pengadaan barang dan jasa, serta audit khusus berdasarkan permintaan. Selain itu, BPKP juga berperan dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan instansi pemerintah melalui pembinaan yang bertujuan membangun budaya akuntabilitas.

Evaluasi terhadap kinerja pengawasan BPKP NTB menjadi penting untuk menilai kontribusinya dalam mendukung pembangunan yang efisien dan akuntabel, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan mencari solusi atas hambatan yang ada. Keberhasilan pengawasan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan hukum, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka tertarik mengambil judul tentang Proses Pencapaian Kinerja Badan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Bidang Instansi Pemerintah Pusat).

TINJAUAN LITERATUR

Pencapaian kinerja dalam konteks lembaga pemerintahan, termasuk BPKP, dapat diartikan sebagai hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta efektivitas proses yang dijalankan dalam mencapai hasil tersebut. Menurut Irawan et al., kinerja lembaga pengawasan sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan, integritas, dan kepatuhan terhadap standar operasional yang ditetapkan Irawan et al. (2022).

Proses pencapaian kinerja BPKP dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, termasuk pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Pengawasan merupakan elemen krusial yang membentuk efektivitas kinerja. Amiruddin menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif berdampak positif pada peningkatan kinerja pegawai serta pengelolaan keuangan yang lebih baik (Amiruddin, 2017). Di samping itu, pengawasan yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang disalurkan digunakan secara tepat dan akuntabel, sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan atau korupsi (Yusrizal, 2020).

Kemudian, pentingnya akuntabilitas dalam proses pencapaian kinerja BPKP juga tidak dapat diabaikan, karena akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Penelitian oleh Taqiudin et al. menjelaskan bahwa akuntabilitas yang tinggi akan mendukung peningkatan kinerja, terutama dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis (Taqiudin et al., 2023). Dalam hal ini, BPKP sebagai lembaga pengawasan memiliki fungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, transparansi juga menjadi aspek penting dalam pencapaian kinerja BPKP, di mana transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memahami pengelolaan keuangan publik. Hal ini sejalan dengan *findings* dari penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan berkontribusi terhadap peningkatan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan (Pera et al., 2024). Upaya BPKP dalam meningkatkan transparansi dapat berupa penyampaian laporan hasil audit dan pemantauan secara berkala kepada publik.

Terakhir, dalam upaya meningkatkan kinerja, BPKP juga menghadapi tantangan yang harus dikelola dengan baik, termasuk keberadaan sistem informasi manajemen yang efisien. Penelitian di bidang sistem informasi menunjukkan bahwa penerapan sistem yang efektif,

seperti SIMDA, dapat membantu dalam pengaturan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas (Vatresia & Pasaribu, 2023). Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan hasil dari berbagai elemen yang saling terkait, meliputi pengawasan, akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Setiap elemen tersebut memiliki peran yang signifikan dalam menentukan seberapa baik BPKP dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP). Data diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang yang berlangsung selama 122 hari, mulai dari 5 Agustus hingga 5 Desember 2024. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi partisipatif: Penulis terlibat langsung dalam kegiatan operasional seperti pengarsipan dokumen, penginputan data keuangan, dan penyusunan laporan tugas.
2. Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder berupa laporan kinerja, surat tugas, dan dokumen internal BPKP.
3. Wawancara informal: Dilakukan dengan pegawai bidang IPP untuk memahami alur kerja dan tantangan pengawasan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah aktivitas pengawasan, efektivitas pelaksanaan tugas, serta kontribusi BPKP terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Hasil analisis digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja pengawasan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada dibawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung dibawah Menteri Keuangan. Djawatan Akuntan Negara (DAN) merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi dibawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah Lembaga pemerintah non departemen

(LPND) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Perwakilan BPKP Provinsi NTB terletak di Jl. Majapahit Nomor 23A, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan kode pos 83116. Instansi ini dapat dihubungi melalui situs resmi mereka di www.bpkp.co.id atau melalui email di ntb@bpkp.co.id. Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan BPKP NTB juga dapat dihubungi melalui telepon di nomor (0370) 638248.

Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan

Merujuk pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024, kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Khususnya Pada Bidang Instansi Pemerintah Pusat Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan. Terdapat 2 sasaran atas kegiatan tersebut berupa:

1. Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional.
2. Pengawasan Pembangunan atas Perbaikan Tata Kelola Pemerintah K/I/D/BU Yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan kinerja antara BPKP Pusat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencantumkan sasaran strategis kegiatan, indikator kinerja kegiatan, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 berdasarkan surat MKOT Nomor PR.00/S- 109/SU01/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Surat MKOT Nomor OT.04/SP-1301/SU01/1/2023 tanggal 22 Desember 2023, dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 1
Perjanjian Kienrka Program dan kegiatan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Pengawasan atas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	85%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	2 Kegiatan Prioritas Daerah
	Jumah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	1 PSN
2. Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Pada K/I/B/BU Yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP	Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindak lanjuti	80%

Capaian Kinerja Tahun 2023

Ringkasan Kinerja (Bidang Instansi Pemerintah Pusat)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 atas 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Bidang Instansi Pemerintah Pusat seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, 3 IKK telah mencapai target dan 1 indikator kineja kegiatan belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target disebabkan stakeholder belum berkomitmen penuh dalam meningkatkan tata kelola pemerintah. Secara ringkas realisasi pencapaian sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel Berikut ini :

Tabel 2
Indikator Kinerja 2023 Sumber Dari Lakip BPKP NTB 2023

CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2023 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT					
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1.Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	85	100	117,65%
	2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100%
	3. Jumah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	6	600%
2. Meningkatnya Kesadaran Tata Kelola Pemerintah Pada K/I/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP NTB	Presentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	%	80	50,98	63,73%

Uraian Kinerja (Bidang Instansi Pemerintah Pusat)

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Bidang IPP berdasarkan Sasaran kegiatan bidang instansi pemerintah pusat “Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pembangunan nasional” terdapat 3 indikator kerja dengan target pencapaian seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Kinerja Sasaran 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	85	100	117,65%
	2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100%
	3. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	6	600%

Pada tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil mencapai dan bahkan melampaui target-target pengawasan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan, BPKP berhasil menyelesaikan 100% hambatan yang ada, melampaui target 85% dengan capaian 117,65%. Selain itu, BPKP juga berhasil mengawasi seluruh dua kegiatan pembangunan prioritas daerah yang direncanakan, dengan capaian 100%. Pencapaian luar biasa juga tercatat dalam pengawasan proyek strategis nasional, di mana BPKP mengawasi 6 proyek, jauh melebihi target 1 proyek, dengan capaian 600%. Keseluruhan capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi tinggi dalam pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan di NTB pada tahun 2023.

Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

Indikator "Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan" dibuat oleh BPKP NTB sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan kinerja terhadap proyek pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hambatan atau kendala dalam pelaksanaan dapat diatasi, baik yang terkait dengan pengelolaan keuangan, administrasi, atau koordinasi antar instansi pemerintah.

Adanya indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan lancar, tanpa hambatan yang signifikan, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BPKP NTB dapat memantau efektivitas dan efisiensi pengawasan yang dilakukan, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya sesuai dengan rencana. Evaluasi terhadap hambatan yang teratasi akan memberikan gambaran mengenai kemampuan BPKP dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang menghambat pembangunan di wilayah NTB.

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diukur dengan rumus:

Jumlah Laporan EHKP yang kesepakatannya terlaksana

Total penugasan EHKP yang diterbitkan

Pada Tahun 2023, Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan berdasarkan hasil pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 100% atau mencapai 117,65% dari target Perkin Tahun 2023 sebesar 85% Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan sebesar 100% berasal dari pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi terhadap kegiatan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB) pada Proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan PT Brantas Abipraya – PT Mina Trasindo Tobautan (KSO). Upaya-upaya penting yang telah dilakukan selama Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain dengan melakukan pengawasan atas kegiatan non prioritas (NON-APP) berupa Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB) pada Proyek Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah daerah agar mengidentifikasi dan Pengembangan Informasi Awal atas Risiko Kecurangan dan Permasalahan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Tematik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi adalah kegiatan yang menjadi perwujudan pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang professional serta responsive menjawab kebutuhan daerah. Indikator Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi diukur dengan banyaknya kegiatan APPD yang dilaksanakan oleh Perwakilan. Tahun 2023 Perwakilan BPKP NTB melaksanakan 2 kegiatan APP yaitu:

1. Pengawasan atas Program Pengembangan 99 Desa Wisata NTB Gemilang
2. Pengawasan atas Tata Kelola Komoditas Hortikultura Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi Tahun 2023 berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebanyak 2 kegiatan atau mencapai 100% dari target perkin Tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan. Pencapaian kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” didukung dengan realisasi output kegiatan sebanyak 17 laporan atau 113,33% dari target 15 laporan, penggunaan dana sebesar Rp659.584.163,00 atau 99,38% dari anggaran sebesar Rp663.702.000,00 dan SDM (OH) sebanyak 4.564 OH atau 99,85% dari rencana sebanyak 4.557 OH. Dari sisi penggunaan dana maupun SDM, kinerja sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari rerata capaian output sebesar 113,33%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,38%, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan OH sebesar 99,85%.

Jumlah Proyek Strategi Nasional yang Tercapai Sesuai Target

Indikator jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan target- target kegiatan prioritas pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan PSN yang tercapai sesuai target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sah. PSN disimpulkan tercapai sesuai target

apabila seluruh target indikator keberhasilan PSN mencapai/melampaui target tahun bersangkutan. Pada tahun 2023, PSN yang telah mencapai target berdasarkan hasil pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 6 PSN atau 600% dari target Perkin tahun 2023 sebanyak 1 PSN. PSN yang telah mencapai target sebagai berikut:

Tabel 3
PSN Yang Tercapai Sesuai Target

No	Nama PSN	Indikator	Target	Realisasi
1	Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Fisik Pekerjaan	100%	100%
2	Bendungan Bintang Bano	Fisik Pekerjaan	100%	100%
3	Bendungan Beringin Sila	Fisik Pekerjaan	100%	100%
4	Mandalika-Pelebaran Jalan Kuta-Kruak	KSPN DPSP	100%	100%
5	Mandalika-Pembangunan Saluran Pengendali Banjir	KSPN DPSP	100%	100%
6	Mandalika (Pembangunan Jalan By Pas BIL-Mandalika 17,4km)	KSPN DPSP	100%	100%

Sasaran Kegiatan 2: “Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintah pada K/L/P/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP” Diukur melalui 1 (satu) IKK yaitu: Persentase Rekomendasi Strategis Yang Ditindaklanjuti

Tabel 4
Kinerja Sasaran 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2. Meningkatkan Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintah pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	50,98	63,73%

Pada Tahun 2023, Rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan yang tertera pada Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 50,98% atau 63,73% dari target perkin Tahun 2023 sebesar 80% atau sebanyak 52 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 102 rekomendasi yang tertera pada Laporan Gubernur. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain dengan melakukan kegiatan pengawasan pada seluruh Agenda Prioritas Pengawasan (APP). Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja Tahun 2023 yaitu kurangnya komitmen pimpinan stakeholder untuk melakukan perubahan yang lebih baik.

Dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024, akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Atensi atau penyampaian surat penegasan kepada pemda terkait rekomendasi strategis yang telah disampaikan.
2. Melaksanakan penugasan monitoring berkelanjutan atas rekomendasi strategis dan menginformasikan kepada OPD terkait untuk dapat menyelesaikan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
3. Menyarankan kepada Mitra/OPD untuk membentuk Satgas sebagai penanggungjawab tindak lanjut hasil pengawasan BPKP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi NTB menunjukkan capaian kinerja yang signifikan sepanjang tahun 2023, terutama dalam aspek pengawasan pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan menyelesaikan seluruh hambatan pembangunan (117,65% dari target), pengawasan penuh atas dua kegiatan prioritas daerah, serta pelampauan target pengawasan proyek strategis nasional (600%) mencerminkan efektivitas peran BPKP dalam mendorong pembangunan yang efisien dan akuntabel. Akan tetapi tantangan masih dihadapi dalam pengawasan tata kelola instansi pemerintah, khususnya terkait tindak lanjut atas rekomendasi strategis yang hanya mencapai 50,98% dari target 80%. Rendahnya komitmen stakeholder menjadi faktor utama yang menghambat perbaikan tata kelola. Oleh karena itu, peningkatan sinergi dan komitmen lintas pihak menjadi krusial untuk memperkuat efektivitas pengawasan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat hambatan dalam aspek tertentu, kinerja BPKP NTB pada tahun 2023 menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Untuk optimalisasi di tahun berikutnya, diperlukan strategi penguatan tindak lanjut rekomendasi melalui penegasan komunikasi, monitoring berkelanjutan, dan pembentukan satuan tugas khusus. Dari uraian sebelumnya diharapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat meningkatkan dan mempertahankan perannya sebagai pemeriksa intern pemerintah yang memiliki integritas dan profesionalisme tinggi. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, BPKP diharapkan dapat terus memberikan rekomendasi yang konstruktif dan mendukung peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait lainnya, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Amiruddin, A. (2017). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus Iisip Yapis Biak*, 12(1), 45-53. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v12i1.56>
- D, A., Yudi, Y., & Friyani, R. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). *JAR*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10941>
- Harsono, H., Helmi, S., & Acon, L. (2023). Determinan Audit Judgment Pada Auditor Pemerintah. *Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i1.62696>
- Haryoko, K., Nangoi, G., & Kalangi, L. (2017). Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.16902>

- Irawan, M. and Khodijah, S. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Bpkp) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tipikor. *Rechtenstudent*, 2(3), 278-292. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.87>
- Irawan, N., Syarif, A., & Fitria, F. (2022). Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. *Mendapo Journal of Administrative Law*, 3(1), 56-69. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.13221>
- Letik, N., Muskanan, M., & Dethan, M. (2025). Faktor-Faktor Yang Menjadi Peluang dan Tantangan Dalam Penanganan Laporan Whistleblowing Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur. *Indo-Fintech Intellectuals Journal Of Economics And Business*, 5(2), 4869-4881. <https://doi.org/10.54373/ifiheb.v5i2.3124>
- Pera, C., Ga, L., & Kiak, N. (2024). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. *GLORY*, 5(2), 299-304. <https://doi.org/10.35508/glory.v5i2.13057>
- Safarah, N. and Umar, H. (2024). Pengaruh Independensi, Pengalaman Dan Skeptisisme Auditor Pada Kemampuan Auditor Mendeteksi Korupsi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 1343-1362. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4586>
- Sofyanty, D. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Tindakan Whistleblowing. *Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 3(1), 43-50. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v3i1.5023>
- Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137-158. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>
- Tasik, P., Remmang, H., & Faridah, F. (2024). Peranan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar. *Accounting*, 2(3), 163-171. <https://doi.org/10.56326/access.v2i3.2788>
- Taqiudin, M., Anggara, D., & Nukman, N. (2023). Analisis Pengawasan Konstruksi: Kajian Kinerja Konsultan Pengawas Di Proyek Gedung Rsud Awet Muda Narmada. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro Sipil Dan Teknik Informasi*, 6(2), 189-195. <https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.4584>
- Vatresia, A. and Pasaribu, T. (2023). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dengan Metode Delone Dan Mclean Success Model Dan Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 13(1), 70-77. <https://doi.org/10.21456/vol13iss1pp70-77>
- Yusrizal, Y. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 21. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065>